



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



KKP
2025
REVISI

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA 2025

(TRIWULAN II)



LKKPN
PEKANBARU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Rahmat Irfansyah

Muhammad Lukman Faishol

Penyusun :

Muhammad Alrizky

Kontributor :

Hanna Maryam Meilasari

Muhamad Faisal Siddiq

Pejabat Fungsional Tertentu LKKPN Pekanbaru

Penanggungjawab Kegiatan Teknis Pengelolaan Kawasan

Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan 2 Tahun 2025 LKKPN Pekanbaru ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja LKKPN Pekanbaru periode Triwulan 2 Tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Harapan kami kiranya LKJ ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan LKj di tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Kami harap saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan LKKPN Pekanbaru diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Juli 2025



Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,

D. Rahmat Irfansyah, M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Kelautan.

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Target Kinerja LKKPN Pekanbaru periode Triwulan 2 tahun 2025 terdiri 5 indikator kinerja yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Laporan SPIP, Indeks Profesionalitas ASN, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, dan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP. Berdasarkan capaian realisasi dan target indikator kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LKKPN Pekanbaru triwulan 2 tahun 2025 sebesar 112,72 atau berada dalam kategori Istimewa.

Pada penetapan anggaran 2025 terdapat anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 9.350.154.000 dan anggaran bersumber PNBPN sebesar Rp6.648.992.000 sehingga total pagu LKKPN Pekanbaru Rp15.999.146.000, namun terdapat blokir penghematan anggaran sebesar Rp.6.674.918.000 sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi sebesar Rp9.324.228.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp. 4.643.549.513 (29,02%) sedangkan berdasarkan pagu efektif setelah proses penghematan, persentase realisasi anggaran menjadi sebesar 49,66%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1. Penjelasan Umum	7
1.2. Tugas dan Fungsi.....	8
1.3. Permasalahan Utama	8
1.4. Sistematika Laporan Kinerja	9
BAB II . PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Rencana Kerja.....	10
2.1.1. Arah Kebijakan	10
2.1.2. Sasaran Strategis	11
2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja.....	17
2.2.1. Indikator Kinerja.....	17
2.2.2. Anggaran	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja.....	21
3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1	23
3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	23
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2	29
3.3.1. IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang).	29
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3	31
3.4.1. IK 3. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan).....	31
3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4	34
3.5.1. IK 4. Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).	34
3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5	34
3.6.1. IK 5. Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	34

3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6	35
3.7.1. IK 6. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	36
3.8. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7	37
3.8.1. IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)	38
3.8.2. IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%).....	39
3.8.3. IK 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	41
3.8.4. IK 10. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	43
3.8.5. IK 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	46
3.8.6. IK 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).....	48
3.8.7. IK 13. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	50
3.8.8. IK 14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks). 52	
3.8.9. IK 14. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)	54
3.8.10. IK 15 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	56
3.7.11. IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai) ...	57
3.8. Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV. PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Tindak Lanjut.....	61
4.3. Rekomendasi.....	61
LAMPIRAN.....	62

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) unit eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. LKKPN Pekanbaru memiliki tugas utama untuk melakukan pengelolaan terhadap Kawasan konservasi perairan di wilayah bagian barat Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. sampai dengan tahun 2023 terdapat 2 (dua) Kawasan Konservasi (KK) yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LKKPN Pekanbaru sebagai pelaksananya dengan total luas kawasan 1.305.321,5 Ha, terdiri dari Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (KK Kep. Anambas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.265.401,5 Ha, dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya (KK Pulau Pieh) yang wilayahnya membentang berada di 3 (tiga) kabupaten/kota (Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman) dengan luas 39.920 Ha.

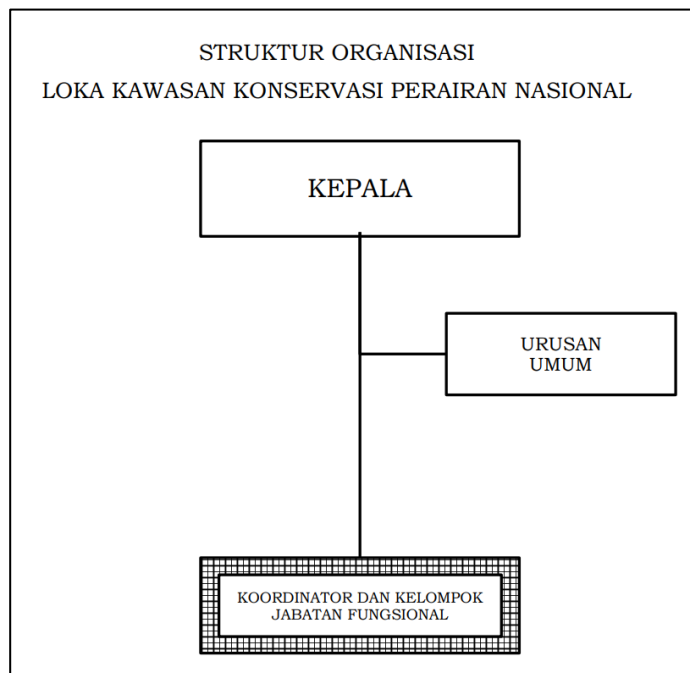
Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Pengelolaan kawasan konservasi perairan memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan Kawasan konservasi.

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan; pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi.

LKKPN Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dengan tingkat eselon IV dan dibantu oleh seorang kepala urusan umum, dan koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapannya. Sementara, kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan LKKPN mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya seperti melaksanakan

pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi LKKPN Pekanbaru

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, LKKPN Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan;
- pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional;
- pelaksanaan jejaring dan kemitraan di bidang konservasi sumber daya ikan;
- pengelolaan sistem, data, dan informasi; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Permasalahan Utama

Melihat capaian pengelolaan serta kondisi tahun 2024, rekomendasi yang dapat dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi dasar SDM pengelola di bidang penyadartahuan dan pendampingan masyarakat bersama lembaga/unit kerja yang terkait.
2. Menyusun rencana kebutuhan infrastruktur pendukung serta melengkapi sarana dan prasarana pengelolaan kawasan.
3. Menyediakan sarana informasi yang memadai untuk pelayanan perizinan dan keberadaan kawasan konservasi.
4. Melakukan upaya peningkatan hari layar serta memperluas area jangkauan monitoring bersama pihak terkait.
5. Melakukan pendataan jumlah tenaga kerja pariwisata dan perikanan di sekitar kawasan konservasi.
6. Melakukan pendataan populasi target yang terdampak penjangkauan atas keberadaan kawasan konservasi.

Laporan kinerja periode Triwulan 2 tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja

2.1.1. Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. lima program tersebut adalah (1) Program Pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) Program nilai tambah dan daya saing industry, (3) Program kualitas lingkungan hidup, (4) Program pengelolaan perikanan dan kelautan (5) Program dukungan manajemen.

LKKPN Pekanbaru mendukung Program kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan

Keanekaragaman Hayati Laut dengan sasaran kegiatan “terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau *Appendix CITES*”.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan (SK) yang dilaksanakan oleh LKKPN Pekanbaru ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta arah kebijakan. Sasaran kegiatan LKKPN Pekanbaru 2025 yang akan dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan-1 adalah “Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai).
- Sasaran Kegiatan-2 adalah “Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang).
- Sasaran Kegiatan-3 adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan).
- Sasaran Kegiatan-4 adalah “Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai).
- Sasaran Kegiatan-5 adalah “Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan indikator kinerja: Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
- Sasaran Kinerja-6 adalah “Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru”, dengan Indikator Kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen).

- Sasaran Kinerja-7 yaitu “ Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru” dengan indikator kinerja :
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)
 - Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)
 - Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)
 - Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)
 - Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)
 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)
 - Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)

2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Arahan kebijakan Ditjen PKRL sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
2. pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
4. pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
6. pengelolaan perizinan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif;
7. peningkatan kemandirian Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
8. tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKRL.

Kemudian Arahan Kebijakan LKKPN Pekanbaru dalam melakukan pengelolaan Kawasan konservasi perairan nasional di dua Kawasan yang *inline* dengan arah kebijakan Ditjen PKRL di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
2. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LKKPN Pekanbaru.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi nasional, kelautan dan perikanan serta strategi Ditjen PKRL di atas, maka dengan mengacu kepada tugas, fungsi

dan wewenang LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan, maka strategi pelaksanaan yang akan ditempuh untuk masing-masing arah kebijakan LKKPN Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan LKKPN Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
 - a) Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kep. Anambas
Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.
Untuk mengukur capaian keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun peningkatan pengelolaan dapat diketahui dari penilaian EVIKA yang telah menjadi standar dalam melakukan evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tingkatan level efektivitas ditunjukkan dengan perbedaan warna yaitu level perunggu, level perak, dan level emas. EVIKA adalah metode evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumber daya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Tabel 1. Kriteria EVIKA

Kriteria	No	Indikator	Penanggung jawab	Bobot
Input	1	Status Kawasan	Unit eselon 2	15
	2	Rencana Zonasi	Unit eselon 2	10
	3	Rencana pengelolaan	Unit eselon 2	20
	4	Sumber daya manusia	Unit eselon 2	25
	5	Anggaran	Unit eselon 2	20
	6	Sarana dan prasarana	Unit eselon 2	10
				100
Proses	1	SOP pengelolaan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	2	Pengawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	3	Penjangkauan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	4	Kemitraan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	5	Pemantauan sumber daya kawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	6	Pengelolaan sarana dan prasarana	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	7	Perizinan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	8	Pemberdayaan masyarakat	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
				100
Output	1	Pemanfaatan terkendali	Unit eselon 2	20
	2	Ancaman	Unit eselon 2	15
	3	Tingkat kepatuhan	Unit eselon 2	15
	4	Pengetahuan masyarakat	Unit eselon 2	15
	5	Pemberdayaan masyarakat	Unit eselon 2	20
	6	Data dan informasi	Unit eselon 2	15
				100
Outcome	1	Kondisi target konservasi	Unit eselon 1	30
	2	Kondisi zona inti	Unit eselon 1	25
	3	Kondisi masyarakat penerima manfaat	Unit eselon 1	25
	4	Partisipasi masyarakat	Unit eselon 1	20
				100

Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru antara lain:

- Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penyediaan data series kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mitigasi ancaman sumberdaya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi di KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas tahun 2025 yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktifitas Kawasan Konservasi
- Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi
- Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi
- Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi

b) Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian / lembaga/ pemerintah daerah.

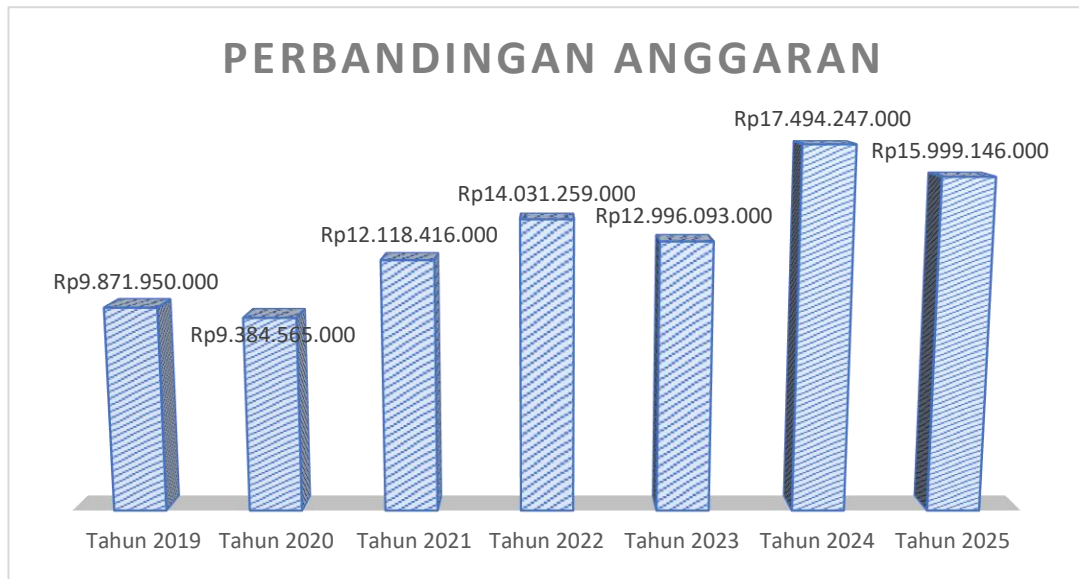
Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 2. Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi

No	Jenis Dokumen	Judul
1.	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
2.	Permen KP No. 37 Tahun 2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut
3.	Kepmen KP No. 70 Tahun 2009	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
4.	Kepmen KP No. 37/KEPMEN-KP/2014	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
5.	Kepmen KP No 38/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2034

Tabel 1. Perbandingan Perjanjian Kinerja LKKPN Pekanbaru Triwulan 1 Tahun 2024 dan Triwulan 1 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 2 2024		TW 2 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	-
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	-
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	80	100	95	100
		8.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	-	-	-	-



Gambar 2. Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2019 – 2025

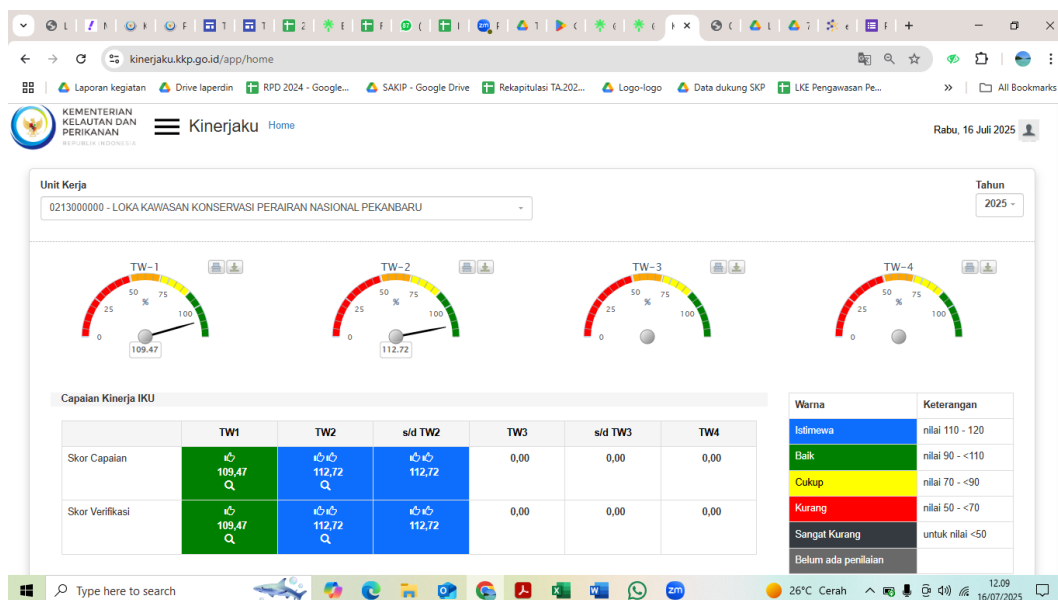
Pagu anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru pada tahun 2025 terbagi atas tiga program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp5.973.992.000, program Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp675.000.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.350.154.000.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru mendukung untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PKRL. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun 2025 ini dilakukan dengan melakukan penginputan data kinerja dalam aplikasi kinerja pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Performa organisasi akan terlihat dari hasil input data kinerja pada aplikasi tersebut dengan Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS)/ Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK). Dari hasil analisis diperoleh nilai kinerja LKKPN Pekanbaru Triwulan 2 tahun 2025 adalah **sebesar 112,72 (Istimewa)**.



Gambar 3. Nilai NPSK periode triwulan 2 Tahun 2025

Tabel 2. Capaian Kinerja LKKPN Pekanbaru Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 2 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	1.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 2 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru	2.	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	-	-	-	Tahunan
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	3.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	Tahunan
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	4.	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	5.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	Tahunan
6.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru	6.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)				Tahunan
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	95	100	105,26	Tahunan
		8.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	-	-	-	Semester
		9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		10.	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Triwulan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW 2 2025		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
		11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	85	100	117,65	Semester
		12.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		13.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	2	2	100	Tahunan
		14.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	78	90,82	116,44	Semester
		15.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		16.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	76	100	120	Triwulan
		17.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan

Tabel 4 di atas merupakan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani Kepala LKKPN Pekanbaru dan Direktur Jenderal Kelautan dan Ruang Laut.

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan 1 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja LKKPN Pekanbaru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pengelolaan LKKPN Pekanbaru adalah Kawasan Konservasi Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi efektivitas dilakukan pada 4 kriteria yaitu: kriteria input, proses, output dan outcome.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja 1

SK-1		Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-1		Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (nilai)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	86,23	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Indikator Kinerja 1 merupakan target tahunan yang dapat terpenuhi pada akhir tahun 2025.
- Capaian realisasi 2024 tidak dapat dibandingkan dengan 2025, karena target tahun 2024 merupakan peningkatan persentase sedangkan target tahun 2025 merupakan nilai efektivitas.

Untuk mengulas ulang capaian EVIKA tahun sebelumnya sebagai pembelajaran, capaian ini berdasarkan kenaikan rata-rata kedua Kawasan Konservasi dari perbandingan nilai transformasi EVIKA 2023 dan penilaian EVIKA Tahun 2024 terdapat kenaikan 12,11%. Adapun rincian data tahun-tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Tabel Perhitungan Capaian Peningkatan Nilai Evika 2022-2024

No	Kawasan Konservasi	Evika 2022-2024			Pengelolaan 2023	Peningkatan 2023 – 2024 (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	Kep. Anambas	66,86	72,67	85,10	Dikelola Berkelanjutan	12,43
2	Pulau Pieh	68,15	75,57	87,35	Dikelola Berkelanjutan	11,78
Jumlah						24,21
Rata-rata						12,11

Secara teknis capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pengelolaan kawasan yang berorientasi dapat output dan outcome di kawasan konservasi perairan. Adapun kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang mendukung pada IK 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 1

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi	√	√	15
2.	Inventarisasi Spot Diving dan Snorkeling Kawasan Konservasi	√	√	15
3.	Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi	√	√	15
4.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak	√	√	15

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh	√	-	15
6.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	15
7.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	15
8.	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
9.	Monitoring Sosek Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
10.	Monitoring Implementasi Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
11.	Monitoring Mangrove Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	-	√	15
12.	Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam Kawasan Konservasi	√	√	15
13.	Konservasi Goes To School	√	√	15
14.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	√	√	15
15.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	√	√	15
16.	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi	√	√	15
17.	Monitoring Cetacean Kawasan Konservasi Pulau Pieh	√	√	15
18.	Monitoring dan Pendataan Napoleon dalam Kawasan Konservasi	√	√	15
19.	Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh	√	√	15

Tabel 8. Output dan Outcome Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 1

No	Kegiatan	Progres Output TW 1	Outcome
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi	Penerimaan PNPB di LKKPN Pekanbaru sebesar Rp. 93.965.000	Terciptanya tertib pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan/magang dan kegiatan pariwisata alam perairan.

No	Kegiatan	Progres Output TW 1	Outcome
2.	Inventarisasi Spot Diving dan Snorkeling Kawasan Konservasi	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Lokasi diving dan snorkling yang tepat
3.	Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan konservasi
4.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Meningkatkan peran serta, dukungan dan aktivitas kegiatan pada 5 (lima) kelompok yang telah menerima bantuan pemerintah untuk melakukan kegiatan konservasi
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Data Series Kawasan
6.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Data Series Kawasan
7	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Data Series Kawasan
8	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban masih menunggu persetujuan buka blokir anggaran PNPB	Data Series Kawasan
9	Monitoring Sosek Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Data Series Kawasan
10	Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Anambas	Menunggu persetujuan buka blokir anggaran PNPB	Data Series Kawasan
11	Monitoring Mangrove Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Data Series Kawasan
12	Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam Kawasan Konservasi	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Data Series Kawasan
13	Konservasi Goes To School	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat efisiensi anggaran	Peningkatan wawasan siswa dan mahasiswa terkait konservasi
14	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	Menunggu persetujuan buka blokir anggaran PNPB	Penyadartahuan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kawasan
15	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Peningkatan kualitas ekosistem di Kawasan

No	Kegiatan	Progres Output TW 1	Outcome
	Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas		
16	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Peningkatan kualitas ekosistem terumbu karang
17	Monitoring Cetacean Kawasan Konservasi Pulau Pieh	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
18	Monitoring dan Pendataan Napoleon dalam Kawasan Konservasi	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Data Series Kawasan
19	Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh	Penyusunan revisi KAK dan RAB	Sarana yang bermanfaat bagi Pemberi dan Pengguna Layanan Kawasan Konservasi

Seluruh kegiatan pendukung peningkatan nilai EVIKA masih dalam proses efisiensi anggaran sehingga belum ada realisasi anggaran. Secara rinci capaian kegiatan pendukung nilai EVIKA dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 1

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi	173,910,000	0	0	50
2.	Inventarisasi <i>Spot Diving</i> dan <i>Snorkeling</i> Kawasan Konservasi	166.455.000	0	0	15
3.	Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi	184.505.000	0	0	15
4.	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kompak	70.028.000	0	0	15
5.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh	197.801.000	0	0	15
6.	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	444.045.000	0	0	15
7.	Monitoring Ekosistem Lamun di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	84.278.000	0	0	15
8.	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	475,690,000	0	0	50
9.	Monitoring Sosek Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	152.212.000	0	0	15

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
10.	Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Anambas	233.612.000	0	0	30
11.	Monitoring Mangrove Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	89.576.000	0	0	15
12.	Monitoring Biota Predator/ Invasive dalam Kawasan Konservasi	74.102.000	0	0	15
13.	Konservasi Goes To School	215.495.000	0	0	15
14.	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	109.294.000	0	0	30
15.	Sosialisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas	220.171.000	0	0	15
16.	Monitoring Rehabilitasi/ Restorasi Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi	170.238.000	0	0	15
17.	Monitoring Cetacean Kawasan Konservasi Pulau Pieh	186.044.000	0	0	15
18.	Monitoring dan Pendataan Napoleon dalam Kawasan Konservasi	163.956.000	0	0	15
19.	Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh	686.500.000	0	0	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pada triwulan 1 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena terkendala efisiensi anggaran, namun tim pelaksana telah dibentuk yang terdiri beberapa pegawai memiliki lebih dari satu kemampuan monitoring sumber daya alam, sehingga lebih efisien dalam melaksanakan tugas monitoring

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja

Akibat efisiensi anggaran, hingga triwulan 2 belum ada realisasi anggaran namun kegiatan layanan perizinan dan monitoring penyu sudah mulai dilaksanakan. Untuk melaksanakan kegiatan lainnya masih menunggu proses buka blokir dengan menyesuaikan postur anggaran terbaru.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 3 adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru pasca dibukanya blokir PNBPN oleh Kementerian Keuangan.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 1

Kegiatan pendukung IK 1 pada Triwulan 2 tahun 2025 yaitu monitoring penyu di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas.



Gambar 4. Monitoring Penyu

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan 2 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.3.1. IK 2. Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang).

Masyarakat di Kawasan Konservasi difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi

Analisis pengukuran capaian IK 2 adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja 2

SK-3		Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-3		masyarakat di kawasan konservasi daerah pada wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru (orang)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	15	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan 2.

Tabel 11. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IK 2

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Bimtek Layanan Perizinan		√	15
2.	Bimbingan Pemandu Wisata Perairan		√	15

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 2

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Bimtek Layanan Perizinan	400.000.000	-	-	15
Bimbingan Pemandu Wisata Perairan	300.000.000	-	-	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 2 telah dilaksanakan efisiensi :

- Aspek Anggaran dan Waktu : kegiatan ini merupakan kegiatan yang diblokir akibat efisiensi anggaran.
- Aspek SDM : pelaksana kegiatan yang sudah berpengalaman dalam melakukan pelatihan dan sertifikasi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Belum ada kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja 2

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran

3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3

Sasaran kegiatan 2 LKKPN Pekanbaru adalah Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

3.4.1. IK 3. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Tujuan membangun kemitraan ini untuk mengoptimalkan peran stakeholders terkait dalam pencapaian efektivitas kawasan konservasi. Kemitraan dalam pengelolaan KKP tertuang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 60 Tahun 2007 tersebut, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Realisasi capaian dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan draft Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru untuk mendukung efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Tabel 13. Target dan Capaian Indiator Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025

SK-3		Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-3		Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)					
Triwulan 2 Tahun 2025		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	2	-	2	1	200

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 3 adalah target tahunan namun telah tercapai 2 kesepakatan kemitraan pada Triwulan 2.
- Realisasi perjanjian kemitraan telah tercapai 200% dari target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 14. Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja 3

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		TWP Pieh	TWP Anambas	
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	√	√	90%

Analisis pengukuran capaian IK 3 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen kesepakatan atau perjanjian kemitraan, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKPN dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan dan jenis ikan. Adapun detail kesepakatanya sebagai berikut:

Tabel 15. Progres Output dan Outcome Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 5

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	LKKPN Pekanbaru telah melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih dan Universitas Bung Hatta.	Melakukan Kemitraan agar dapat membantu dan besinergi dalam mengelola Kawasan Konservai Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Belum ada realisasi anggaran karena efisiensi anggaran

Tabel 16. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 3

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	180.000.000	-	-	90

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Di tengah kendala efisiensi anggaran, tim pelaksana tetap melaksanakan komunikasi dan diskusi dengan dua calon mitra melalui daring. Penandatanganan perjanjian kemitraan dengan Universitas Bung Hatta dan PT PLN UBP Teluk Sirih dilaksanakan di Padang pada waktu yang berdekatan sehingga dapat efisiensi anggaran yang diperlukan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Di tengah efisiensi anggaran, LKKPN Pekanbaru berhasil melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih dan Universitas Bung Hatta.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 3 adalah melaksanakan implementasi kerjasama dengan PT. PLN IP UBP Teluk Sirih dan Universitas Bung Hatta.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 2

Dalam rangka memperkuat sinergi pengelolaan kawasan konservasi laut serta meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sumber daya kelautan, LKKPN Pekanbaru melaksanakan penandatanganan perjanjian kemitraan dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni

2025. Perjanjian ini bertajuk “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat”. Penandatanganan ini bertujuan untuk mendukung program-program edukasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah konservasi, khususnya dalam penguatan pemahaman konservasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.

Pada haru berikutnya Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru bersama PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Teluk Sirih resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan berjudul "Sinergi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya". Perjanjian ini menandai dimulainya kerja sama antara lembaga pemerintah dan sektor BUMN strategis dalam menjaga dan mengelola kawasan konservasi laut, khususnya di Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya. Sinergi ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, berbasis ilmu pengetahuan, dan melibatkan masyarakat lokal. Ruang lingkup kemitraan ini mencakup: pelestarian, rehabilitasi habitat dan populasi ikan; peningkatan pemahaman dan kesadartahuan masyarakat; serta penguatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sebagai bentuk implementasi perjanjian kemitraan, telah dilakukan pembuatan media transplantasi terumbu karang dan kegiatan transplantasi karang pada minggu keempat bulan Juni 2025 dengan menggandeng Yayasan Minang Bahari yang juga merupakan mitra LKKPN Pekanbaru.



Gambar 5. Penandatanganan Kemitraan

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja 5

SK-5		Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-5		Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	1	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan 1
- Identifikasi Pemanfaatan PPK merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 19. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 5

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Identifikasi Perizinan Pemanfaatan PPK	200.000.000	-	-	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pada triwulan 2 kegiatan belum dapat dilaksanakan karena terkendala efisiensi anggaran, namun tim pelaksana telah dibentuk untuk melaksanakan identifikasi perizinan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja

Akibat efisiensi anggaran, hingga triwulan 2 belum ada kegiatan pendukung yang dapat terlaksana. Untuk melaksanakan kegiatan masih menunggu proses buka blokir dengan menyesuaikan postur anggaran terbaru.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 3 adalah melaksanakan kegiatan Pendataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Anambas

3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Sasaran Kegiatan 6 LKKPN Pekanbaru adalah Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.7.1. IK 6. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan.

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- Menemukan penggunaan, pemanfaatan serta riwayat perizinan lokasi, dimana pada implementasi Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi KKPR Laut (KKPRL).
- Mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses penyelenggaraan KKPRL yang sedang berlangsung.
- Mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan dari PNBP.
- Keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah laut.

Penilaian dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut khususnya di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Pulau Pieh berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, mengenai kewajiban mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut terhadap kegiatan yang telah dan akan dilakukan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. Penilaian Indikator Kinerja ini merupakan target Tahunan dengan jumlah target sebanyak 2 dokumen. Target dan capaian Triwulan 2 dapat dilihat pada tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja 6

SK-4		Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru					
IK-4		Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	2	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan 2.

Berikut adalah rincian kegiatan yang mendukung IK 4

Tabel 21. Progres Output dan Outcome Kegiatan pada Triwulan 2

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Sosialisasi dan Verifikasi Penyelenggaraan	Penilaian Teknis atas permohonan Kepala Desa Genting Pulur terkait pembangunan penambahan	1. Penyadartahuan Masyarakat terkait perizinan ruang laut 2. terlaksananya proses penerbitan persetujuan KKPRL dan/atau

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
	Penataan Ruang di KKPN	akses jalan beton di atas air serta PT. Telaga Laut Biru terkait pemanfaatan ruang laut berupa pembangunan akomodasi	konfirmasi KRL di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 3. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya serta TWP Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya
2.	Identifikasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut		1. terkendalinya pemenuhan pelaksanaan kewajiban atas pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru 2. terkendalinya pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan ketentuan zonasinya

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 4

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1	Sosialisasi dan Verifikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di KKPN	149.570.000	-	-	30
2	Identifikasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	325.430.000	-	-	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

- Aspek Anggaran : telah terlaksana penilaian teknis terhadap permohonan Desa Genting Pulur dan PT. Telaga Laut Biru di Kepulauan Anambas melalui daring
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : secara efektif tim dapat melaksanakan sosialisasi, verifikasi, identifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Penilaian teknis pada semester 1 telah dilaksanakan melalui daring. Capaian Indikator Kinerja akan terealisasi pada Semester 2

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan 3 adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru pasca efisiensi

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 4

Pada Triwulan 2 tahun 2025 telah dilakukan penilaian teknis KKPRL atas permohonan Kepala Desa Genting Pulur dan penilaian teknis PKKPRL atas permohonan PT. Telaga Laut Biru di Kepulauan Anambas.

3.8. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan 7 LKKPN Pekanbaru adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.8.1. IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)

Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.1131/DJPK.1/HP.190/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja 7

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-7		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru (%)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
100	80	95	100	105,26	-	95	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LKKPN Pekanbaru triwulan 2 tahun 2025 sama dengan capaian triwulan 2 tahun 2024 yaitu sebanyak 100%.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja.
- Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 95% sedangkan capaian realisasinya sebesar 100% sehingga persentasenya adalah 105,26%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 7 merupakan perhitungan yang dilakukan penilaian oleh Esselon I terkait temuan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. Nilai 100% menggambarkan seluruh hasil pemeriksaan telah dipenuhi.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

LKKPN Pekanbaru memiliki 15 rekomendasi dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi sehingga capaian IK sebesar 100%.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 7 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah perlu tetap mempertahankan performa baik, dengan menanggulangi segala rekomendasi temuan yang ada pada triwulan berikutnya apabila terdapat rekomendasi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 7

LKKPN Pekanbaru telah melaksanakan lima belas tindak lanjut atas seluruh rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Terdapat delapan rekomendasi dari objek pengawasan “Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2024 s.d 2025 secara Daring pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru” dan 7 rekomendasi dari objek pengawasan “Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh pada LKKPN Pekanbaru TA 2024”. seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti hingga status tuntas sebagaimana ditampilkan pada aplikasi sidak.kkp.go.id.

Screenshot 1: Probity Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh

ID	Judul Temuan	Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
11972	Pelaksanaan Pekerjaan Konsultan Pengawas Tidak Sesuai Kontrak	3	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11973	Pengenaan Denda Keterlambatan Berpelensi Tidak Diperhitungkan Dalam Pembayaran Prestasi Pekerjaan	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
11974	Realisasi Pekerjaan Terpasang Tidak Sesuai Kontrak	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

Screenshot 2: Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2024 s.d 2025 secara Daring

ID	Judul Temuan	Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
12693	Target PNBP TA 2025 belum Disusun secara Realistis	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
12694	Pengelolaan Layanan Kawasan Konservasi Belum Optimal	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
12695	Pelaporan atas Penggunaan Dana PNBP Belum Terb	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
12696	Pengamanan Pemijaman Aseel Belum Didukung Administrasi yang Memadai dan Penatasaan BMN Belum Terb	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

Gambar 6. Tampilan Aplikasi SIDAK

3.8.2. IK 8. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Penyelesaian Temuan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan LKKPN Pekanbaru Tahun 2023. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang

ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dimana pengukuran tiap triwulannya tidak dilaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyusunan laporan keuangan LKKPN Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 8

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-8		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 tahun 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	100	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 12 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 1 tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 1 tahun 2024 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian IK presentase hasil pengawasan baru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 8 merupakan penyelesaian LHP BPK dan Audit lainnya. Sehingga keberlangsungan sampai saat ini masih baik dan efisien karena tidak adanya temuan audit.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 8 yang telah dilakukan adalah LHP BPK pada Triwulan II 2025 masih belum ada, sehingga evaluasi lebih kepada menjaga setiap kegiatan agar selalu akuntabel.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 8 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan III tahun 2025 adalah:

- Perlu tetap menyiapkan dokumen keuangan yang baik dan sesuai serta dukungan WBK WBBM dari Pokja 1-6 secara rutin, pembuatan laporan

keuangan rutin, dan BMN untuk mengantisipasi jika ada audit BPK dan Inspektorat kembali.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 8

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai Temuan LHP BPK dan Temuan Audit lainnya:

- Melakukan updating info Laporan Keuangan dan BMN Kantor LKKPN Pekanbaru sampai dengan Triwulan IV tahun 2025.
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Setditjen PKRL terkait isu rencana audit pemeriksaan BPK.

3.8.3. IK 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dengan target nilai 85. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Penilaian WBK mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah, LKKPN Pekanbaru diusulkan dilakukan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) oleh Tim Penilai Nasional.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja 9

SK-6		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-9		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	85	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 9 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 2 tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 2 tahun 2024 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran IK 9 triwulan 2 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Pelayanan Publik	115.000.000	49.656.053	43,18	50
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	15.914.000	12.685.599	79,71	2550

Anggaran dimanfaatkan untuk internalisasi dan sosialisasi WBK/WBBM di LKKPN Pekanbaru, bentuknya dapat berupa sosialisasi verbal, sosialisasi melalui media sosial online maupun mencetak media sosialisasi.

Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) terhadap Unit Kerja yang Diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Tahun 2025 pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 25 Februari s.d. 3 Maret 2025. Tujuan pemantauan adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada LKKPN Pekanbaru Tahun 2024 s.d. Maret 2025, dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada TPN Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan kepada Inspektur Jenderal Nomor : 164/DJPK/HP.430/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 hal Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang akan dinilai menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), LKKPN Pekanbaru menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan III 2025 ini adalah:

- Melakukan penilaian pendahuluan/*Self Assesment* untuk memastikan bahwa pembangunan ZI pada Loka KKPN Pekanbaru telah memenuhi nilai ambang batas yang dipersyaratkan untuk diajukan kepada Tim Penilai Nasional.



Gambar 7. Self Assesment LKE Pembangunan Zona Integritas

3.8.4. IK 10. Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Penilaian IK 10 dilakukan dengan Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Adapun terdapat cara penilaian PM SAKIP, yang sesuai dengan peraturan terbaru PERMENPAN No.88 Tahun 2021 dan yang diacu oleh Inspektorat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

1. Nilai PM SAKIP lingkup LKKPN Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 10

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-10		Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	70	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan 2
- Capaian realisasi 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 belum dapat dilihat karena IK Tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 22. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 6

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	51.000.000	3.759.500	7,37	50
2.	Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	132.000.000	34.308.791	25,99	50

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Indikator Kinerja 10 merupakan Nilai PM SAKIP yang didukung oleh kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Layanan perencanaan program serta layanan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan oleh tim yang sama sehingga efisiensi sumber daya dan anggaran dapat tercapai.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 10 adalah menyusun dokumen draft Perjanjian Kinerja akibat perubahan unit organisasi eselon 1.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan III 2025 adalah:

- Melakukan revisi anggaran sesuai dengan persetujuan penggunaan anggaran PNB
- Melaporkan dokumen SAKIP tepat waktu.
- Melaksanakan Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2025
- Secara tepat waktu melakukan input laporan evaluasi melalui aplikasi online

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 10

- Penyusunan dokumen SAKIP dalam rangka mempersiapkan penilaian oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan 3.
- Bersama tim Sekretariat Direktorat Jenderal Kelautan menyusul draft Perjanjian Kinerja terbaru pasca perubahan unit Eselon 1

3.8.5. IK 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai).

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dibagi atas 4 komponen penilaian yaitu (1) kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, (2) efektivitas pelaksanaan anggaran, (3) efisiensi pelaksanaan anggaran, dan (4) kepatuhan terhadap regulasi. 4 komponen tersebut dijabarkan dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagaimana ditampilkan pada tabel 23 .

Tabel 23. Tabulasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Total Nilai		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 11

SK-6		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-11		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
97,59	82	85	100	117,65	2,41	89	112

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- terdapat perbedaan target antara triwulan 2 tahun 2024 dan triwulan 2 tahun 2025.
- berdasarkan aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#> nilai IKPA Triwulan 2 tahun 2025 adalah 100, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKPA Triwulan 2 tahun 2024 yaitu sebesar 97,59.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 25. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 11

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	6.455.000.000	3.073.668.414	47,62	50
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,423,000,000	1.413.666.461	58,34	50

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 11 dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mendukung operasional perkantoran.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 11 yang telah dilakukan adalah:

- Indikator capaian output mendapat nilai maksimal karena melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu melalui aplikasi SAKTI
- Peningkatan nilai IKPA tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran LKKPN Pekanbaru semakin baik.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 11 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 3 tahun 2025 adalah:

- Melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu.
- Melakukan realisasi keuangan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan pada setiap triwulannya.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 11

Program dan Kegiatan pada Triwulan 2 tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai IKPA:

- Memantau aplikasi Omspan (spanint.kemenkeu.go.id)
- Memaksimalkan pelatihan bendahara dan pengelola anggaran di LKKPN Pekanbaru.
- Melakukan pemeriksaan dan dokumen keuangan (Kontrak, TUP, SPM) dan perencanaan anggaran (Kertas Kerja RKAKL) baik sebelum pengajuan revisi atau permohonan pencairan dana.
- Memastikan ketepatan waktu jadwal pengajuan dan pencairan.
- Memastikan ketepatan input dan ketepatan waktu pelaporan capaian output setiap bulannya pada aplikasi SAKTI.

3.8.6. IK 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Capaian pada IKU ini merupakan Target Tahunan sehingga pada triwulan 2 tidak dilaporkan. Pengukuran didapatkan dari aplikasi SMART DJA. Pada akhir tahun 2024 terdapat perubahan nomenklatur yang semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. NKPA Satker didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 26. Bobot Penilaian NKPA

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- b. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- c. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;

- d. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja 12

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-12		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	71,5	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK belum dapat dilihat pada triwulan 2 karena IK dengan target Tahunan yang akan dilaporkan di akhir tahun.
- Capaian realisasi 2025 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena IK Tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan IK 12.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Capaian Realisasi Output merupakan indikator paling berpengaruh dalam penentuan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran oleh karena itu petugas perlu melakukan monitoring Capaian Output melalui aplikasi SAKTI pada setiap kegiatan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 12 yang telah dilakukan adalah berdasarkan pengamatan pada Aplikasi SMART DJA, NKPA LKKPN Pekanbaru Triwulan 2 tahun 2025 masih 2,94.

←

→

↺

↻

🔍

☆

money.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatker

📱

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

Gambar 8. Tampilan NKPA pada aplikasi monev.kemenkeu

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 12 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah melakukan peningkatan performa penyerapan dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca efisiensi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 8

Program dan Kegiatan pada tahun 2025 yang berkaitan dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 2025:

- Memantau aplikasi monev.kemenkeu.go.id.
- Monitoring Realisasi Capaian Output secara tepat waktu dan tepat jumlah.

3.8.7. IK 13. Laporan SPIP yang disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara sederhana SPIP dapat didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada pun perhitungan ini dilihat dari ketercapaian UPT dalam menyelesaikan laporan SPIP yang dilaksanakan setiap Triwulan.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja 13

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-13		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
2	2	2	2	100	-	4	50

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IKU 13 adalah 2 dokumen sesuai dengan target Triwulan 2 2025 ini yaitu 2 dokumen sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.
- Capaian realisasi triwulan 2 tahun 2025 sama dengan capaian triwulan 2 tahun 2024.

Dalam Laporan SPIP Triwulan I s.d IV sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dilakukan pengendalian melalui : (1) Pengendalian Rutin, (2) Pengendalian Berkala, (3) Monitoring Manajemen Risiko. Adapun, dokumen final SPIP LKKPN Pekanbaru Triwulan I sebagai data dukung Indikator Kinerja telah berisikan hasil pemantauan dari 3 (tiga) unsur pengendalian di atas.

Laporan SPIP periode triwulan 2 Tahun 2025 telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.832/LKKPN/TU.140/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 28. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 13

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan BMN	65.900.000	36.374.961	55,20	50
2.	Layanan Manajemen Keuangan	64.900.000	8.600.343	13,25	50

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pelaporan layanan BMN dan manajemen keuangan dapat dilakukan secara online sehingga efisiensi keuangan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan IK 13:

- LKKPN Pekanbaru meraih penyelenggaraan rekonsiliasi SAKTI terbaik periode tahunan tahun 2024 lingkup Ditjen PKRL



Gambar 9. Penghargaan Rekonsiliasi Terbaik Tahun 2024

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 13 yang perlu ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya adalah:

- Mempertahankan penyelenggaraan PIPK secara optimal.
- Inventarisasi Barang Milik Negara
- Menyelaraskan dokumen SPIP dengan Laporan LKJ agar sejalan dan data yang disajikan lebih akurat

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 14

Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode semester 1 tahun 2024 dan verifikasi online triwulan 2 tahun 2025 melalui aplikasi e-Money Bappenas, Kinerja KKP, dan SAKTI Kemenkeu.

3.8.8. IK 14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)

Capaian pada IK 14 merupakan Target Semester pada Triwulan II dan Triwulan IV. IK ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Adapun Standar profesionalitas ASN meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Kinerja dan (4) Disiplin dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Kualifikasi.** Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.

2. **Kompetensi.** Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. **Kinerja.** Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. **Disiplin.** Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Pengolahan atas hasil penilaian IK akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id>.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja 14

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-10		Indeks Profesionalitas ASN LKKPN Pekanbaru					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
91,94	83	78	90,82	116,43	-1,12	80	113,5

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian IP ASN triwulan 2 tahun 2025 menurun 1,12 dibandingkan dengan capaian triwulan 2 tahun 2024.
- Capaian IP ASN triwulan 2 tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung Capaian IK 10

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Ditjen PKRL	27.440.000	11.940.000	43,51	50

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui daring dan luring sehingga meningkatkan nilai IP ASN.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 10 yang telah dilakukan adalah:

- 100% pegawai LKKPN Pekanbaru telah mengisi data dukung sasaran kinerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.
- seluruh pegawai LKKPN Pekanbaru mengikuti pelatihan SAKIP melalui *Electronic Milenial Learning (e-milea)* KKP.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 3 tahun 2025 adalah:

- Melakukan monitoring SKP dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN.
- Mengawal dan melakukan peningkatan nilai IP ASN hingga akhir tahun 2025 agar target tetap tercapai.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 13

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, LKKPN Pekanbaru mencapai IP ASN tertinggi lingkup DJPK dengan indeks sebesar 90,82.

3.8.9. IK 15. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LKKPN Pekanbaru (nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal.

Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dinilai dengan menggunakan Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal selama periode Tahun 2025. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

1. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
2. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
5. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
6. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
7. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
8. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja 15

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-15		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	80	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 15 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 2 tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 2 tahun 2024 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Dalam rangka Pemusnahan arsip yang akan dilakukan LKKPN Pekanbaru yang direncanakan mencakup dokumen-dokumen Keuangan, Kepegawaian yang berasal dari kurun waktu 2009 hingga 2013 Loka KKP Pekanbaru telah memulai memilah-milah berkas yang akan di musnakan. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkup KKP.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan pemantauan terhadap nilai kearsipan LKKPN Pekanbaru.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 15

Arsiparis LKKPN Pekanbaru mengikuti Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan I (PNBP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh ANRI.



Gambar 10. Pelatihan fungsional arsiparis

3.8.10. IK 16 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Metode perhitungan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja 16

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-15		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)					
Triwulan 2 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	76	100	120	-	76	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 16 adalah sebesar 100%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76% sehingga persentase capaian sebesar 120%.
- Capaian realisasi triwulan 2 tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 2 tahun 2024 karena ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 16 merupakan perhitungan evaluasi triwulan, namun dalam perhitungan efisiensi Sumber Daya tidak terlihat dikarenakan penilaian bersumber dari assesment eselon I. Sementara dari tingkat efisiensi anggaran dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan anggaran khusus namun tetap dapat memberikan capaian realisasi keberhasilan Indikator Kinerja maksimal. Dalam pemanfaatan aplikasi <https://sidak.kkp.go.id/> juga merupakan aplikasi berbasis web yang tidak berbayar.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100%. Keberhasilan Indikator ini LKKPN Pekanbaru memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan 100%.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 15 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah mempertahankan performa 100% sampai dengan akhir tahun 2025.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 16

Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP adalah:

- Melakukan input data kegiatan Institusi LKKPN Pekanbaru pada laman sirup.lkpp.go.id.
- Melakukan pemutakhiran rutin data rencana umum pengadaan lingkup LKKPN Pekanbaru

3.7.11. IK 17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- Mengumumkan informasi publik
- Menyediakan informasi publik
- Sarana dan Prasarana
- Kelembagaan
- Digitalisasi

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja 17

SK-7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-16		Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 2	Realisasi TW 2	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 2 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	91	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 16 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan 2 tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan 2 tahun 2024 karena ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2025.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

- Melakukan pemutakhiran rutin data untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan
- Mendapat predikat **Informatif** dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2022 – 2024.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 17 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan 3 tahun 2025 adalah evaluasi ketersediaan data PPID berdasarkan peraturan terbaru.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 18

Dalam mendukung Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik, LKKPN Pekanbaru melakukan pemutakhiran rutin data untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan.

3.8. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru pada tahun 2025 terbagi atas tiga program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp5.973.992.000, program Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp675.000.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.350.154.000.

Tabel 42. Realisasi Anggaran Triwulan 2 tahun 2025

Uraian	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Program Dukungan Manajemen	Total
Pagu (Rp)	5.973.992.000	675.000.000	9.350.154.000	15,999,146,000
Realisasi (Rp)	0	0	4.644.660.122	4.644.660.122
% Realisasi	0%	0%	49,67%	42,03%

Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, LKKPN Pekanbaru melakukan tindak lanjut berupa identifikasi anggaran yang berdampak efisiensi belanja. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar anggaran LKKPN Pekanbaru mengalami efisiensi/blokir anggaran sehingga realisasi anggaran sampai dengan Triwulan 2 tahun 2025 hanya 42,03%.

Perbandingan NKO

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periode Triwulan 2 tahun 2025 dengan unit kerja sejenis yaitu dengan BKKPN Kupang dikarenakan kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel 43:

Tabel 43. Perbandingan Capaian NKO dengan Unit Kerja Sejenis

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang		
1	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitas dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru (Orang)	-	-	-	-
3	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Kesepakatan)	-	120	120	LKKPN Pekanbaru belum ada realisasi capaian karena target tahunan

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LKKPN Pekanbaru	BKKPN Kupang		
4	Nilai Minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
5	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	-
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	-	-	-	-
7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	105,26	105,26	-	sama
8	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	-	-	-	-
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
10	Nilai PM SAKIP Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	117,65	117,65	-	sama
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
13	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LKKPN Pekanbaru (Dokumen)	100	100	-	sama
14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LKKPN Pekanbaru (Indeks)	116,44	107,90	8,54	LKKPN Pekanbaru lebih tinggi
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LKKPN Pekanbaru (%)	120	120	-	sama
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LKKPN Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
Nilai Kinerja Organisasi		112,72	114,59	1,87	BKKPN Kupang lebih tinggi

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan NKO BKKPN Kupang lebih tinggi daripada NKO LKKPN Pekanbaru karena BKKPN Kupang memiliki target kemitraan pada Triwulan 2 sedangkan LKKPN Pekanbaru target kemitraan pada Triwulan 4.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja LKKPN Pekanbaru periode Triwulan 2 Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Indikator Kinerja LKKPN Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian dan Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian kinerja LKKPN Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak/aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja LKKPN Pekanbaru terdiri atas 17 Indikator Kinerja.

Pelaksanaan program kegiatan periode Triwulan 2 Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan seluruh Indikator Kinerja tercapai sesuai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,72 (Istimewa).

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi LKj Triwulan 1 tahun 2025 terdapat beberapa tindaklanjut sebagai perbaikan kinerja ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	melakukan peningkatan performa penyerapan anggaran dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca efisiensi	Sampai dengan akhir triwulan 2 belum dapat menggunakan anggaran secara optimal dan masih menunggu persetujuan buka blokir anggaran PNBPN namun telah dilaksanakan rapat koordinasi atas penggunaan dana PNBPN lingkup Ditjen PK dan pembahasan percepatan realisasi PNBPN Tahun 2025 lingkup Ditjen PK
2.	Memantau pemenuhan kinerja Triwulan 2 pasca efisiensi belanja	Telah dilaksanakannya Rapat Internal membahas progres capaian Indikator Kinerja. Rapat tersebut sesuai dengan Surat Kepala LKKPN Pekanbaru nomor B.742/LKKPN/TU.330/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025.

4.3. Rekomendasi

Hal yang dapat dilaksanakan guna menjawab tantangan pada laporan kinerja periode selanjutnya, yaitu:

1. melakukan peningkatan performa penyerapan anggaran dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca dibuka blokir anggaran PNBPN.
2. Memantau pemenuhan kinerja Triwulan 3 pasca dibuka blokir anggaran PNBPN.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1.

SURAT PENYAMPAIAN SPIP TRIWULAN 2 TAHUN 2025





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
KELAUTAN DAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

JALAN BUDI LUHUR KELURAHAN MENTANGOR PEKANBARU-RIAU 28286

TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAN www.kkp.go.id SUREL kkpn.pekanbaru@kkp.go.id

Nomor : B.852/LKKPN/TU.140/VII/2025

10 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Bapak nomor B 1020 /DJPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II Tahun 2025 LKKPN Pekanbaru sebagaimana terlampir.

LKKPN Pekanbaru senantiasa berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dengan menerapkan budaya anti korupsi, anti gratifikasi, dan anti penyuapan dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



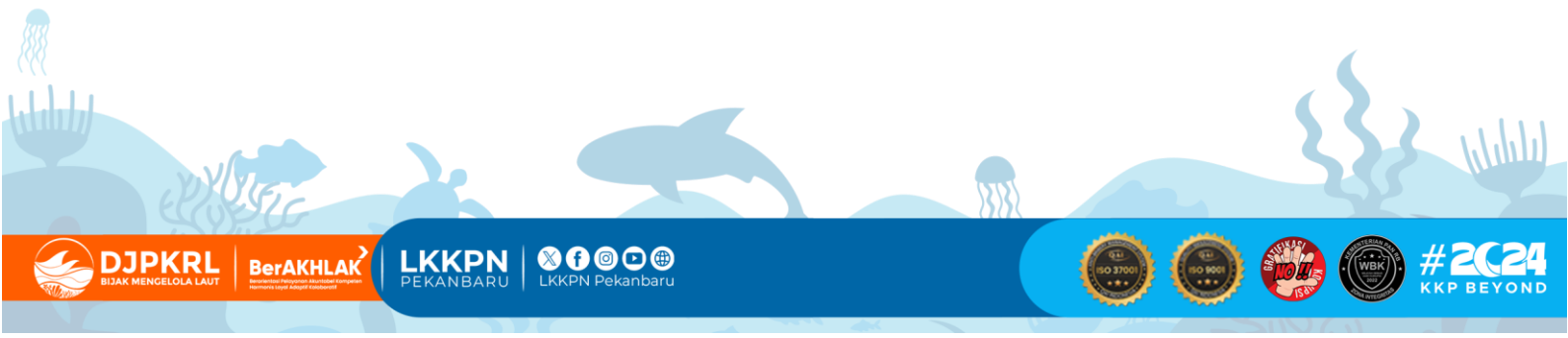
**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rahmat Irfansyah

LAMPIRAN 2.

DATA DUKUNG NILAI IKPA

TRIWULAN 2



DJPKRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

LKKPN
PEKANBARU

WhatsApp Facebook Instagram YouTube Globe
LKKPN Pekanbaru



#2024
KKP BEYOND



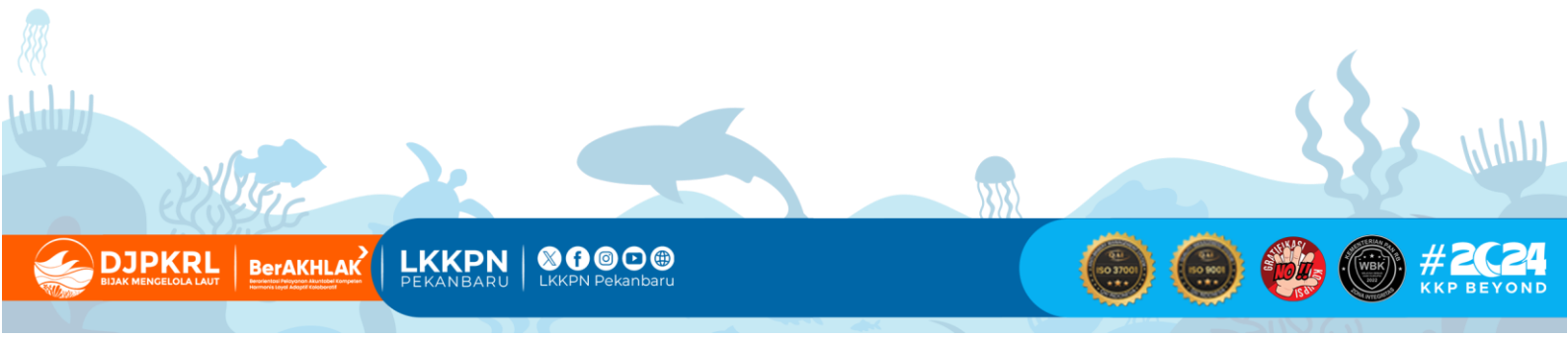
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

LAMPIRAN 3.

DATA DUKUNG INDEKS PROFESIONALITAS ASN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lampiran
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara Semester I Tahun 2025 lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

14 Juli 2025

Yth.

1. Direktur lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
2. Kepala UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan

di Tempat

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor : 1137/SJ.3/KP.720/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Data Capaian dan Evaluasi Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II/Semester I Tahun 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada Dashboard IP ASN KKP per tanggal 10 Juli 2025, nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2025, yaitu sebesar **85,22** (kategori tinggi) terdiri dari :
 - a. Kualifikasi sebesar 22,39;
 - b. Kompetensi sebesar 31,61;
 - c. Kinerja sebesar 26,23;
 - d. Displin sebesar 4,99.
2. Kinerja Indeks Profesionalitas ASN secara umum tercapai di atas target, hal ini karena adanya penyesuaian penghitungan bobot dimensi sebagaimana lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sumber data yang digunakan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga validitas data lebih terjamin.
3. Persentase capaian dimensi kompetensi masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi pegawai dan peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN individu pegawai karena perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional berdasarkan riwayat sertifikasi di menu "kursus" dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Lampiran Surat
 Nomor : B.1159/DJPK.1/KP.720/VII/2025
 Tanggal : 14 Juli 2025

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester I Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,09	27,44	24,68	5	80,2
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,83	29,34	25	5	82,18
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,39	28,32	25	5	81,71
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,4	28,09	25,85	5	82,34
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,71	29,06	26,29	5	84,06
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23	30,66	26,5	5	85,16
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,58	34,65	27,28	5	88,51
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	21,7	34,76	24,8	5	86,26
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,25	34,98	27,94	5	90,18
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	21,84	31,36	26,02	5	84,22
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,83	32,62	25,17	5	84,62
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,3	31,84	26,1	4,92	84,16
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22	36,19	27,62	5	90,82
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,25	30,44	27,55	5	85,53

Keterangan :

Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN melalui tautan <https://ipasn.sdmao.id/>

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Miftahul Huda

A decorative banner at the bottom of the page featuring stylized illustrations of marine life (jellyfish, coral, fish) in shades of blue and green. On the left, there is an orange bar with the DJPKRL logo and the text 'BIJAK MENGELOLA LAUT'. Next to it is a blue bar with the 'BerAKHLAK' logo and the text 'BerAKHLAK Berakhlak Berprestasi Berkompetensi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan'. In the center, there is a dark blue bar with the 'LKKPN PEKANBARU' logo and social media icons. On the right, there is a light blue bar with several award logos (ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001) and the text '#2024 KKP BEYOND'.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 11 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan II Tahun 2025

Yth.

1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katimja Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 669/ITJ.0/RC.610/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan II Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 98,04% yaitu sebanyak 150 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 153 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke III Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal PK

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan II Tahun 2025

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	38	35	98,04	3	8,57	98,04
2	Dit. KE	0	0	0	0	0	100
3	Dit. P3K	14	14	100	100	0	100
4	Dit. Jasbar	0	0	0	0	0	100
5	Dit. SDK	19	19	100	100	0	100
6	Dit. KSG	8	8	100	100	0	100
7	BKKPN Kupang	15	15	100	100	0	100
8	BPSPL Makasar	18	18	100	100	0	100
9	BPSPL Padang	9	9	100	100	0	100
10	LPSPL Sorong	10	10	100	100	0	100
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	15	15	100	100	0	100
13	BPSPL Denpasar	7	7	100	100	0	100
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
15	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		153	150	98,04	3	8,57	98,04

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,

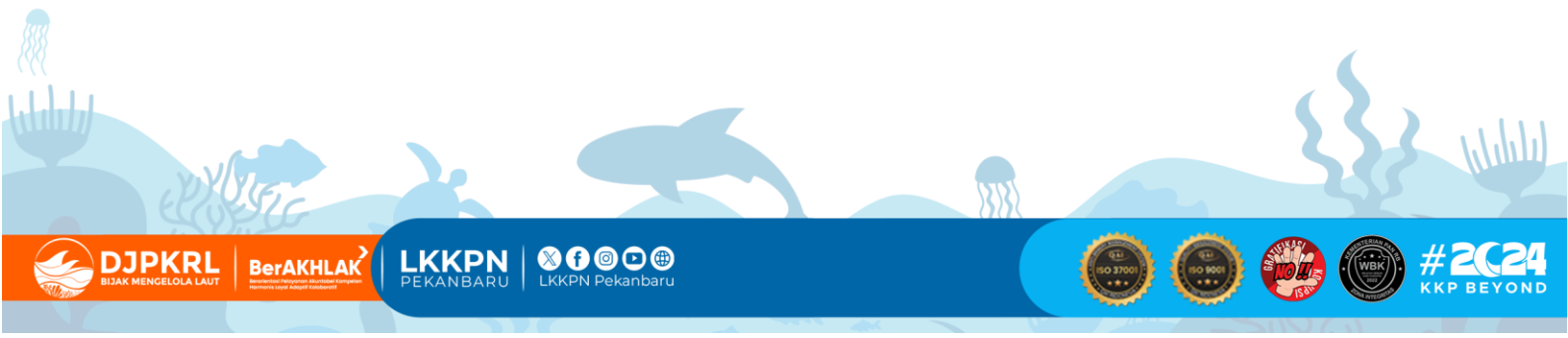


Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

LAMPIRAN 5.

DATA DUKUNG PERSENTASE RUP YANG DIUMUMKAN



DJP
DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN

BerAKHLAK
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

LKKPN
PEKANBARU



LKKPN Pekanbaru



#2024
KKP BEYOND



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025 14 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Berkenaan dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP Nomor: 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, bersama ini disampaikan rincian hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nama Satker	Rekap Pagu Terumumkan (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW2 (Rp)	% RUP Terumumkan
			Triwulan 2				
			RUP Penyedia (Rp)	RUP Swakelola (Rp)	Total (Rp)		
		DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	183.520.669.000	50.284.466.000	233.805.135.000	-	100%
1	622145	Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL	107.361.299.000	50.284.466.000	157.645.765.000	-	100%
2	499346	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	2.720.603.000	-	2.720.603.000	-	100%
3	477456	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	2.916.231.000	-	2.916.231.000	-	100%
4	477425	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	2.343.328.000	-	2.343.328.000	-	100%
5	477431	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	14.676.457.000	-	14.676.457.000	-	100%
6	477419	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	5.536.826.000	-	5.536.826.000	-	100%
7	499352	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	26.318.377.000	-	26.318.377.000	-	100%
8	290145	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	3.062.287.000	-	3.062.287.000	-	100%
9	477440	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	18.585.261.000	-	18.585.261.000	-	100%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025

Tanggal : 14 Juli 2025

DAFTAR PEJABAT

1. Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut
2. Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
6. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
7. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
9. Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

LAMPIRAN 6.

PENGHARGAAN

